

SEKOLAH RESPONS POSITIF

Tak Gunakan Kurikulum Nasional, Tak Boleh Daftar PDSS

YOGYA (KR) - Kebijakan soal sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) mendapat respons positif. PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 sistem paket dan SKS. Karena beberapa kurikulum tersebut memang yang diterapkan di Indonesia jadi sudah sepantasnya jika sekolah mentaati.

"Kalau saya secara pribadi menyambut adanya aturan itu. Saya kira sekolah tidak terlalu masalah, karena mayoritas sudah menerapkan kurikulum nasional seperti yang disebutkan di atas. Saat ini untuk SMAN 9 Yogyakarta sudah mulai melakukan pendataan berkaitan dengan

pengisian PDSS," kata Kepala SMAN 9 Yogyakarta Drs Jumadi MSi di Yogyakarta, Minggu (10/1).

Jumadi menyatakan, pengisian PDSS yang menjadi salah satu bagian penting dalam SNMPTN membutuhkan kecermatan. Menyadari akan hal itu SMAN 9 berusaha membantu sis-

wa dengan melakukan pendampingan, supaya mereka tidak salah dalam pemilihan jurusan. Mengingat dalam tahun ini ada beberapa perubahan kebijakan dalam SNMPTN. Salah satunya bagi mereka yang sudah dinyatakan lolos dalam SNMPTN tidak boleh mendaftar di SBMPTN.

"Memang saat melakukan pengisian PDSS sempat ada kendala. Hal itu terjadi karena ada ketidaksinkronan data diserver Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) dan Data Dapodik. Kami berharap hal itu bisa segera diatasi, karena jika sekolah akan mengalami kesulitan dan tidak bisa berbuat apa-apa," terang Jumadi.

Komentar senada diungkap

kan Kepala SMAN 10 Yogyakarta Sri Murni. Menurutnya, apapun yang menjadi kebijakan dari pusat pihaknya siap mengikuti dan menjalankan dengan sebaik-baiknya, termasuk soal PDSS.

"Sekolah yang terakreditasi A, oleh LTMPPT memperoleh porsi 40 persen dari jumlah siswa untuk mengikuti SNMPTN tahun 2021. Supaya proses pendataan bisa lancar, langkah yang dilakukan sekolah adalah membuat perankingan berdasarkan nilai rapor siswa kelas XII. Perankingan itu dilakukan mulai semester 1 sampai 5 semester 5. Siswa kelas XII kami minta membuat password terkait tiket masuk ke Perguruan tinggi," ungkapnya. (Ria)

UNTUK DIY - JAWA TENGAH

UMY Terjankan 2.500 Mahasiswa KKN IT

BANTUL (KR) - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerjankan 2.500 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler IT Berbasis Komunitas di DIY dan Jawa Tengah. Sebelum pelaksanaan, Sabtu (9/1), UMY mengadakan sosialisasi secara online mengenai konsep dan tata laksana KKN Reguler IT Berbasis Komunitas 2021 dengan dihadiri oleh mahasiswa dan juga orang tua/wali.

"Semua dilakukan UMY dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. KKN IT adalah program yang secara penuh memanfaatkan jaringan internet dalam proses pengabdian, bertujuan untuk mengurangi kontak antara mahasiswa dengan masyarakat. Kami mengontrol ketat seluruh kelompok KKN yang tersebar di DIY dan Jawa Tengah. 90% kegiatan dilakukan dengan tidak kontak langsung dengan masyarakat," ujar Rektor UMY Dr Ir Gunawan Budiyo MP IPM.

Disebutkan, KKN berbasis IT ini dan dilaksanakan secara daring ini sekaligus "menjawab" keputusan pemerintah mengenai pemberlakuan Pengetatan Tervatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) yang mulai

dilaksanakan Senin (11/1) hari ini. Dengan system daring dan berbasis IT, diharapkan kata Gunawan mampu membuat mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan dapat bekerja sama dengan mitra UMKM maupun organisasi sosial. Tentu dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan berbagai aplikasi serta media sosial yang lazim dan familiar digunakan.

"Seperti layaknya work from home (WfH) dan work from office (WfO), dalam pelaksanaan KKN berbasis IT ini setiap kelompok secara perwakilan akan melakukan koordinasi secara langsung di lapangan 1-2 kali seminggu," sambung Kepala Divisi KKN LP3M UMY Dr Aris Slamet Widodo SP MSC.

Selain KKN Reguler Berbasis IT, UMY pada semester genap 2020/2021 ini juga memberikan dua opsi lain dalam pelaksanaan KKN yaitu KKN pendampingan di Panti Asuhan di DIY sebanyak 220 kelompok, dan 114 KKN pemberdayaan sekolah Muhammadiyah. "Untuk KKN kali ini kami akan menasarak 580 UMKM, 265 organisasi sosial, 22 panti asuhan di DIY, dan 13 sekolah Muhammadiyah," jelas Aris. (Fsy)

KEBIJAKAN PTKM DITERAPKAN

Pertumbuhan Ekonomi DIY Diprediksi Turun

YOGYA (KR) - Kebijakan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) yang akan mulai diberlakukan di DIY pada 11 Januari sampai 25 Januari secara otomatis akan membatasi kegiatan ekonomi dan sosial. Apalagi kebijakan itu tidak hanya diberlakukan di DIY, tapi juga Jawa dan Bali. Kondisi tersebut secara otomatis akan membuat pertumbuhan ekonomi DIY mengalami penurunan dari yang sudah diprediksikan sebelumnya.

"Kebijakan pemerintah pusat dan DIY soal PTKM dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Dampak dari adanya pembatasan itu, sudah pasti akan mengurangi pendapatan masyarakat. Khususnya terkait dengan sektor pariwisata, karena sektor ini yang cukup ramai ketika ada masa liburan. Sedang untuk sektor pendidikan relatif tidak terpengaruh karena sejak April 2020 sampai sekarang masih dilakukan secara online," kata dosen Ekonomi dari STIE YKPN Dr Rudy

Badrudin di Yogyakarta, Minggu (10/1).

Rudy mengatakan, selama ini sektor pendidikan dan pariwisata memiliki peran cukup penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Bahkan dari kedua sektor tersebut telah menyumbang PDRB DIY sekitar 65 persen. Jadi dengan adanya kebijakan PTKM secara otomatis menjadi tantangan tersendiri agar seandainya terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan. "Dalam kondisi sekarang kesehatan masyarakat harus dikedepankan. Apalagi jika melihat dari penyebaran Covid-19 yang semakin masif," ujarnya.

Rudy menambahkan, supaya pertumbuhan ekonomi di DIY bisa segera bangkit, pelaku ekonomi khususnya wisata harus semakin ketat lagi dalam mengikuti peraturan dan penegakkan prokes. Pasaunya harus diakui masih banyak pelaku wisata di DIY yang sudah memberlakukan Prokes. (Ria)

'LINK AND MATCH' DENGAN INDUSTRI

Kurikulum SMK Bakal Dirombak

JAKARTA (KR) - Untuk meningkatkan keteserapan lulusan, kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bakal dirombak. Perubahan kurikulum menjadi dasar melakukan *link and match* dengan industri.

Demikian diungkapkan Dirjen Pendidikan Vokasi (Dirjen Vokasi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wikan Sakarinto di Jakarta, Minggu (10/1 2021). "Untuk SMK dilakukan lima aspek perubahan. Di antaranya mata pelajaran yang bersifat akademik dan teori akan dikontekstualisasikan menjadi vokasional. Misalnya, matematika dan Bahasa Indonesia akan menjadi matematika terapan dan Bahasa Indonesia terapan," jelasnya.

Kedua, magang atau praktik kerja industri (prakerin) minimal satu semester atau lebih. Ketiga, terdapat mata pelajaran *project base learning* dan ide kreatif kewirausahaan sela-

ma tiga semester. Keempat, SMK akan menyediakan mata pelajaran pilihan selama tiga semester, misalnya siswa jurusan teknik mesin dapat mengambil mata pelajaran pilihan marketing. Terakhir, terdapat co-curricular wajib di tiap semester, misalnya membangun desa dan pengabdian masyarakat.

"Pada program SMK Center of Excellent (CoE) 2020, kami juga telah memasukkan sembilan paket pernikahan massal pendidikan vokasi dan industri. Sedangkan pada 2021 akan diluncurkan program SMK Pusat Keunggulan (PK), yakni penyempurnaan SMK CoE dengan melibatkan PTV untuk membina SMK," jelas Wikan.

Kemendikbud sudah memiliki langkah-langkah strategis demi mencapai tujuan. Mulai dari menciptakan SDM lulusan yang kompeten, unggul, dan sesuai dengan kebutuhan indus-

tri skala nasional maupun global, jadi peningkatan produktivitas, inovasi, serta daya saing yang signifikan hingga memajukan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan dan karir lulusan vokasi lebih baik, menciptakan generasi wirausaha yang tangguh dan inovatif, input peserta didik pendidikan vokasi harus passion dengan dunia vokasi, hingga keterlibatan dunia industri dan kerja semaksimal mungkin.

"Kami juga fokus dalam peningkatan kemampuan nonteknis dan karakter lulusan agar menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Mampu menjawab tantangan kebutuhan kompetensi masa kini dan mendatang, dan riset terapan yang menghasilkan produk nyata yang dihilirkan ke pasar industri dan masyarakat," terang Wikan. (Ati)

EKONOMI

HARGA PRODUSEN GABAH DIY TURUN Ditemukan Harga GKG di Bawah HPP

YOGYA (KR) - Harga produsen gabah di tingkat petani DIY pada Desember 2020 rata-rata sebesar Rp 4.652,66 atau turun 2,66 persen dibanding November 2020 sebesar Rp 4.780 dan di tingkat penggilingan turun 2,82 persen dari Rp 4.854,62 menjadi Rp 4.717,55/kg di Desember 2020. Terdapat 6 observasi harga gabah kualitas GKG di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang terjadi di wilayah Kabupaten Kulonprogo selama Desember 2020.

"Harga gabah tertinggi di tingkat petani senilai Rp 5.800/kg pada gabah kualitas Gabah Kering Giling (GKG) dengan varietas Cianjur terjadi di Moyudan Sleman. Sebaliknya, harga gabah terendah di tingkat petani senilai Rp 4.250/kg pada Gabah Luar Kualitas dengan varietas IR 64 terjadi di wilayah Sewon Bantul," tutur Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Heru Margono di Yogyakarta, Minggu (10/1).

Heru menjelaskan, jumlah observasi gabah di DIY pada Desember 2020 sebanyak 94 transaksi, terdiri dari GKG sebanyak 21 observasi atau 22,34 persen, Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 26 observasi atau 27,66 persen dan Gabah Luar Kualitas sebanyak 47 observasi atau 50 persen.

Transaksi penjualan gabah luar kualitas sebanyak 47 observasi atau 50 persen terjadi di Kulonprogo sebanyak 5 observasi atau 5,32 persen, Bantul sebanyak 39 observasi atau 41,49 persen dan Sleman sebanyak 3 observasi atau 3,19 persen. (Ira)

Libur Nataru, Trafik Data XL Axiata Melonjak 70 pCt

JAKARTA (KR) - Jaringan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) berhasil melalui masa libur panjang Natal hingga Tahun Baru 2021 dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Selama periode 24 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021, secara nasional, rata-rata trafik pemakaian layanan data XL Axiata oleh pelanggan meningkat hingga 15%, dengan kenaikan tertinggi mencapai 70%. Seperti yang telah diprediksi, layanan streaming mendominasi kenaikan trafik layanan. Sebaliknya, trafik percakapan (voice) mengalami penurunan sebesar 6% dan untuk trafik SMS mengalami kenaikan 2% dibandingkan hari biasa.



Pengecekan perangkat jaringan XL Axiata.

Axiata I Gede Darmayusa mengatakan, pandemi tidak serta-merta menghentikan masyarakat untuk merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Meski tidak leluasa beraktivitas di luar ruang, namun mereka tetap bisa mengisi masa liburan

naik. Beberapa kawasan pemukiman/perumahan yang mengalami kenaikan tersebut, terutama adalah perumahan di kota Jakarta, Medan, Semarang, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Palembang, Cibubur, Cirebon dan sebagainya.

"Kenaikan trafik data tertinggi pada Hari Natal, antara 24-25 Desember 2020, secara rata-rata meningkat sebesar lebih dari 3% dibanding hari biasa, dengan kenaikan tertinggi mencapai sekitar 17%. Jika dibandingkan dengan Natal tahun sebelumnya, kenaikan trafik yang terjadi mencapai lebih dari 40%," ungkap Darmayusa di Jakarta, Minggu (10/1). (Rsv)

Kehilangan Reservasi 30 Persen, PHRI DIY Butuh Relaksasi

YOGYA (KR) - Bisnis perhotelan dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengaku cukup terpukul dengan adanya berbagai kebijakan pengetatan maupun pembatasan yang diberlakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19.

Anggota PHRI DIY yang beroperasi telah kehilangan reservasi atau pemesanan tamu dari luar DIY setidaknya 30 persen hingga saat ini. Untuk itu, PHRI DIY sangat berharap adanya relaksasi dari Pemerintah bagi pelaku industri pariwisata di DIY supaya bisa bertahan di tengah segala kebijakan pengetatan.

Ketua BPD PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengungkapkan, sebanyak 189 bisnis perhotelan dan restoran yang beroperasi di DIY tengah berjuang mati-matian bertahan saat ini. Dengan segala pengetatan ataupun pembatasan yang diberlakukan pemerintah, termasuk melalui Pengetatan Terbatas Kegiatan Ma-

sarakat (PTKM) di DIY yang dilaksanakan pada Senin (11/1) hingga 25 Januari 2021, PHRI hanya meminta adanya keberpihakan terhadap pelaku industri pariwisata di DIY dengan adanya relaksasi.

"Kami sudah tercekik pandemi Covid-19 selama 10 bulan ini karena sudah menanggung kerugian dan tetap harus mengeluarkan biaya operasional yang cukup tinggi. Kita sudah kehilangan reservasi dari luar DIY setidaknya 30 persen hingga saat ini, jujur reservasi belum nampak dua pekan ke depan," ungkap Deddy di Yogyakarta, Minggu (10/1).

Deddy mengaku, pelaku bisnis perhotelan dan res-

toran di bawah PHRI DIY sangat terpukul dengan kondisi saat ini. Sehingga pihaknya membutuhkan relaksasi dari pemerintah agar tetap bisa bertahan. Hotel bintang 4 dan bintang 5 masih kuat bertahan, hotel bintang 3 setengah kuat dan di bawahnya sudah tidak kuat bahkan gulung

tikar.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto menambahkan, pada prinsipnya siap membantu khususnya memberikan pendampingan pelaksanaan protokol kesehatan maupun CHSE. Hal inilah yang membuat anggota GIPI di

DIY bisa bertahan, termasuk adanya relaksasi yang dibutuhkan para pelaku industri pariwisata di DIY selama ini.

"Relaksasi sangat diperlukan bagi pelaku industri pariwisata agar teman-teman anggota GIPI DIY bisa bertahan di tengah pandemi," pungkasnya. (Ira)



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY 2021

PERTUMBUHAN ekonomi DIY selama periode 2014 sampai 2019 selalu mengalami tren peningkatan. Hanya di tahun 2020, karena pandemi Covid-19 maka diprediksi pertumbuhan ekonomi DIY minus 1,9 persen sampai minus 2,23 persen menurut Bank Indonesia (BI) DIY. Dampak pandemi Covid-19 tersebut masih ditambah tidak ada lagi proyek investasi besar yang bisa menggerakkan ekonomi DIY setelah pembangunan Bandar Udara Internasional baru di Kulon Progo selesai.

Namun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi DIY diproyeksikan kembali positif di kisaran 3,9 sampai 4,3 persen. Selengkapnya Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2014 sampai 2019 yang merupakan data riil dan tahun 2020 yang merupakan data prediksi serta tahun 2021 yang merupakan data proyeksi dapat dilihat pada Tabel.

Ada beberapa alasan mengapa tahun 2021 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi DIY menjadi positif, padahal di tahun 2020 banyak yang memprediksi negatif. Hal itu dikemukakan oleh Kepala BI DIY Hilman Trisnawan dalam pertemuan Tahunan BI baru-baru ini dan juga hasil analisis penulis. Pertama, perbaikan ekonomi nasional dan juga global yang akan mengkait pada perbaikan ekonomi DIY. Kedua, optimisme di-

lakukannya vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Jika pandemi Covid-19 berhasil ditekan, maka perekonomian juga akan pulih, termasuk di DIY. Ketiga, mulai terlihatnya dampak berbagai Program Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) di DIY. Keempat, secara lokal DIY juga mempunyai beberapa program yang berhasil mengangkat perekonomiannya antara lain: program Sinergi Pariwisata

Ngayogyakarta (Siwigny), program Smart Traditional Market (SEMAR), yaitu upaya digitalisasi pasar tradisional dan pengembangan produk UMKM berdaya saing, digitalisasi pertanian, dan lain-lain.

Menurut penulis, sektor yang masih tetap prospektif di 2021 antara lain: sektor pertanian, makanan dan minuman, kesehatan, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif. Yang sebenarnya prospektif adalah sektor pariwisata yang di awal-awal tahun 2020 mulai menggeliat tetapi dengan kewajiban tes PCR Antigen untuk penunjang objek wisata dan mereka yang dari luar DIY ke DIY akan mengerem pertumbuhan sektor pariwisata di DIY.

(Dr Nugroho SBM MSi, Dosen FEB Undip dan anggota Forkom Apik BI (Forum Komunikasi Akademisi Penulis Kebijakan BI)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2014	5,20
2015	4,95
2016	5,05
2017	5,26
2018	6,20
2019	6,60
2020	(1,9) - (2,23)*
2021	3,9 - 4,3 **

Sumber: BPS dan BI DIY. Ket. * Angka dalam kurung berarti minus, * dan ** Angka proyeksi BI DIY. Grafik: Arko